ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)

Dita Arfianti

Warsito Kawedar, SE. M.Si, Akt

ABSTRACT

The objective of this research is to examine the factors that influence information value of local government financial reporting. Information value refers to reliability and timeliness. The factors that influence reliability and timeliness are human resource quality, information technology utilization, internal control system, and local financial monitoring.

Data collection was done by providing questionnaires to 110 heads and staffs of SKPD's accounting department in Batang District. The collected data was processed by using PLS (partial least square).

Hypotheses testing results are as follows. First, internal control system has a positive and significant influence on reliability of local government financial reporting while human resource quality, information technology utilization, and internal control system have no influence. Second, human resource quality and information technology utilization have a positive and significant influence on timeliness of local government financial reporting while internal control system has no influence.

Keywords : *local government financial reporting, information value, human resource quality, information technology utilization, internal control system, local financial monitoring, and* PLS (*partial least square).*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain :

1) Relevan, yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
    a) Manfaat umpan balik (*feedback value*).
    b) Manfaat prediktif (*predictive value*).
    c) Tepat waktu (*timeliness*).
    d) Lengkap
2) Andal, yang memenuhi karakteristik berikut :
    a) Penyajian jujur.
    b) Dapat diverifikasi (*verifiability*).
    c) Netralitas
3) Dapat dibandingkan
4) Dapat dipahami

Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh, seperti yang telah diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2009, dinyatakan bahwa terhadap 348 LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 14 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 259 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 30 entitas, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 45 entitas. Disamping itu, perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2007 sampai tahun 2009 menunjukkan peningkatan kualitas yang tidak terlalu tinggi.

Selain kualitas LKPD yang belum maksimal, Badan Pemeriksa Keuangan juga menemukan adanya kasus dugaan korupsi. Pada pemeriksaan semester II tahun 2008, ada 11 dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke KPK, 6 diantaranya terkait

dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Disamping itu, sekitar 683 objek pemeriksaan yang diperiksa oleh BPK, hampir separuhnya didominasi oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan penyampaian LKPD dari waktu yang telah ditentukan. Adapun LKPD yang terlambat berjumlah 191 dari total 469 pemerintah daerah. Dengan demikian, hanya 275 pemerintah daerah yang menyerahkan LKPD secara tepat waktu.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan, diantaranya keandalan dan ketepatwaktuan. Mengingat bahwa keandalan dan ketepatwaktuan merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor-faktor yang akan diteliti antara lain : kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yaitu keandalan dan ketepatwaktuan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi

   Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

   Memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunis dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Safitri, 2009).

2.1.2 Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Adapun fungsi akuntabilitas meliputi tiga unsur, yaitu (1) *providing information about decisions and actions taken during the course of operating entity*, (2) *having the internal parties review the*

information, and (3) *taking corrective actions where necessary*. Suatu entitas yang *accountable* adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor, atau masyarakat secara luas) me-*review* informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif (Sugijanto, *et al* (1995:6) dalam Ulum, 2001).

2.1.3 Transparansi (*transparency*)

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

2.1.4 Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi.

2.1.5 Nilai Informasi

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam

informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) :

5) Relevan, yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
    e) Manfaat umpan balik (*feedback value*).
    f) Manfaat prediktif (*predictive value*).
    g) Tepat waktu (*timeliness*).
    h) Lengkap
6) Andal, yang memenuhi karakteristik berikut :
    d) Penyajian jujur.
    e) Dapat diverifikasi (*verifiability*).
    f) Netralitas
7) Dapat dibandingkan
8) Dapat dipahami

2.1.6 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. (Widodo, 2001 dalam Kharis, 2010). Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan bahwa "Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut". Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta

informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Insani, 2010).

Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan. Selain itu, pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatwaktuan. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H1 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

H2 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.1.7 Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al*., 2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masysrakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010).

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

H4 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.1.8 Keandalan (*Reliability*) dan Ketepatwaktuan (*Timeliness*) Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Ketepatwaktuan merupakan penyajian informasi yang sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Apabila informasi yang diterima oleh pengguna laporan

keuangan tidak tepat waktu, maka informasi tersebut tidak memiliki nilai. Akibatnya, akan berdampak dalam proses pengambilan keputusan.

2.1.9 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keandalan. Hasil evaluasi pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa masih terdapat LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar dan memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara sistem pengendalian intern dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H5 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.1.10 Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Yosa (2010) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk

merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Di dalam prosedur pengawasan, mencakup pula mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat disampaikan dengan tepat waktu. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pengawasan keuangan daerah dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan terdapat hubungan positif antara pengawasan keuangan daerah dengan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H6 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

H7 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

III. METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

   Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Variabel Independen

   Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang dengan jumlah 67 SKPD. Pengambilan sampel (*sampling method*) terhadap responden dilakukan secara *purposive*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003 dalam Indriasari, 2008). Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD, yang meliputi kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan. Jumlah kuesioner yang dikirim kepada responden sebanyak 150 kuesioner, yang didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang akan diberikan kepada responden, yaitu kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan.

Teknik yang digunakan untuk mengukur data interval pada kuesioner ini adalah dengan skala likert lima angka penilaian, yaitu skor 1 untuk pernyataan sangat tidak setuju, skor 2 untuk pernyataan tidak setuju, skor 3 untuk pernyataan netral, skor 4 untuk pernyataan setuju, dan skor 5 untuk pernyataan sangat setuju.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan angka-angka dan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis. Adapun alat analisis yang digunakan antara lain uji instrumen data yang mencakup uji validitas dan reliabilitas. Penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS), yang terdiri dari model pengukuran atau *outer model* dan model struktural atau *inner model.*

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Model Measurement (*Outer Model*)

4.1.1 Nilai *Convergent Validity* Persamaan 1 (Setelah Re-estimasi)

Tabel 4.7
Nilai *Outer Loading* Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator	Original Sampel Estimate	Mean of Sub Sample	Standard Deviation	T-Statistic
KSDM2	0,752	0,721	0,078	9,634
KSDM3	0,689	0,661	0,125	5,517
KSDM4	0,803	0,799	0,050	15,921
KSDM5	0,672	0,628	0,136	4,929
KSDM6	0,524	0,438	0,166	3,147
KSDM7	0,522	0,517	0,138	3,782

Sumber : data primer yang diolah, 2011

Berdasarkan hasil *outer loading* untuk variabel kualitas sumber daya manusia, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai *loading* lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi *convergent validity*, yang artinya baik dalam mengukur variabel kualitas sumber daya manusia.

Tabel 4.8
Nilai *Outer Loading* Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indikator	Original Sampel Estimate	Mean of Sub Sample	Standard Deviation	T-Statistic
PTI1	0,547	0,573	0,155	3,543
PTI2	0,604	0,622	0,120	5,053
PTI3	0,643	0,687	0,110	5,849
PTI4	0,715	0,723	0,088	8,106
PTI5	0,735	0,738	0,098	7,495
PTI6	0,736	0,731	0,071	10,437
PTI7	0,726	0,712	0,103	7,057

Berdasarkan hasil *outer loading* untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai *loading* lebih

besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi *convergent validity*, yang artinya baik dalam mengukur variabel pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 4.9

Nilai *Outer Loading* Variabel Sistem Pengendalian Intern

Indikator	Original Sampel Estimate	Mean of Sub Sample	Standard Deviation	T-Statistic
SPI2	0,783	0,766	0,075	10,394
SPI3	0,721	0,709	0,123	5,875
SPI4	0,800	0,774	0,063	12,608
SPI5	0,741	0,729	0,047	15,756
SPI6	0,803	0,790	0,063	12,784

Sumber : data primer yang diolah, 2011

Berdasarkan hasil *outer loading* untuk variabel sistem pengendalian intern, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai *loading* lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi *convergent validity*, yang artinya baik dalam mengukur variabel sistem pengendalian intern.

Tabel 4.10

Nilai *Outer Loading* Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

Indikator	Original Sampel Estimate	Mean of Sub Sample	Standard Deviation	T-Statistic
PKD1	0,749	0,736	0,91	8,279
PKD2	0,736	0,752	0,106	6.907
PKD3	0,739	0,754	0,058	12,670
PKD4	0,734	0,739	0,087	8.474
PKD5	0,668	0,653	0,114	5,881
PKD6	0,723	0,696	0,078	9,248
PKD7	0,574	0,515	0,139	4,136

Sumber : data primer yang diolah, 2011

Berdasarkan hasil *outer loading* untuk variabel pengawasan keuangan daerah, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai *loading* lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi *convergent validity*, yang artinya baik dalam mengukur variabel pengawasan keuangan daerah.

Tabel 4.11

Nilai *Outer Loading* Variabel Keandalan

Indikator	Original Sampel Estimate	Mean of Sub Sample	Standard Deviation	T-Statistic
KA1	0,728	0,692	0,069	10,529
KA2	0,789	0,771	0,062	12,653
KA3	0,762	0,756	0,052	14,530
KA4	0,782	0,775	0,048	16,228
KA5	0,762	0,737	0,089	8,539
KA6	0,789	0,775	0,062	12,808
KA7	0,734	0,709	0,081	9,076
KA8	0,740	0,718	0,073	10,116

Sumber : data primer yang diolah, 2011

Berdasarkan hasil *outer loading* untuk variabel keandalan, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai *loading* lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi *convergent validity*, yang artinya baik dalam mengukur variabel keandalan.

4.1.2 Nilai *Convergent Validity* Persamaan 2

Tabel 4.12

Nilai *Outer Loading* Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator	Original Sampel Estimate	Mean of Sub Sample	Standard Deviation	T-Statistic
KSDM2	0,739	0,715	0,116	6,369
KSDM3	0,699	0,691	0,093	7,488
KSDM4	0,796	0,759	0,090	8,867
KSDM5	0,682	0,662	0,137	4,980
KSDM6	0,527	0,519	0,172	3,067
KSDM7	0,523	0,552	0,161	3,243

Sumber : data primer yang diolah, 2011

Berdasarkan hasil *outer loading* untuk variabel kualitas sumber daya manusia, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai *loading* lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi *convergent validity*, yang artinya baik dalam mengukur variabel kualitas sumber daya manusia.

Tabel 4.13

Nilai *Outer Loading* Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indikator	Original Sampel Estimate	Mean of Sub Sample	Standard Deviation	T-Statistic
PTI1	0,599	0,627	0,102	5,851
PTI2	0,568	0,568	0,120	4,471
PTI3	0,601	0,624	0,152	3,964
PTI4	0,664	0,706	0,092	7,237
PTI5	0,756	0,729	0,092	8,219
PTI6	0,761	0,738	0,077	9,860
PTI7	0,734	0,726	0,071	10,412

Sumber : data primer yang diolah, 2011

Berdasarkan hasil *outer loading* untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai *loading* lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi *convergent validity*, yang artinya baik dalam mengukur variabel pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 4.14

Nilai *Outer Loading* Variabel PKD

Indikator	Original Sampel Estimate	Mean of Sub Sample	Standard Deviation	T-Statistic
PKD1	0,745	0,727	0,095	7,816
PKD2	0,725	0,746	0,138	5,251
PKD3	0,733	0,718	0,075	9,726
PKD4	0,723	0,729	0,088	8,234
PKD5	0,678	0,652	0,091	7,491
PKD6	0,733	0,702	0,077	9,463
PKD7	0,588	0,635	0,111	5,290

Sumber : data primer yang diolah, 2011

Berdasarkan hasil *outer loading* untuk variabel PKD, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai *loading* lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi *convergent validity*, yang artinya baik dalam mengukur variabel pengawasan keuangan daerah.

Tabel 4.15

Nilai *Outer Loading* Variabel Ketepatwaktuan

Indikator	Original Sampel Estimate	Mean of Sub Sample	Standard Deviation	T-Statistic
KT1	0,814	0,817	0,040	20,121
KT2	0,830	0,816	0,054	15,186
KT3	0,799	0,786	0,074	10,868

Sumber : data primer yang diolah, 2011

Berdasarkan hasil *outer loading* untuk variabel ketepatwaktuan, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai *loading* lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi *convergent validity*, yang artinya baik dalam mengukur variabel ketepatwaktuan.

4.1.3 *Discriminant Validity*

Pengujian *discriminant validity* dilakukan dengan membandingkan nilai *square root of average extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik (Ghozali, 2008:25). Adapun hasil pengujian discriminant validity untuk persamaan 1 dan 2 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.16

Average Variance Extracted (AVE) Persamaan 1

	Average Variance Extracted (AVE)	Akar AVE
KSDM	0,447	0,668
PTI	0,457	0,676
SPI	0,594	0,771
PKD	0,498	0,706

Sumber : data primer yang diolah, 2011

Model memiliki *discriminant validity* yang baik, jika akar AVE untuk setiap konstruk dalam model lebih tinggi dari korelasi antara konstruk tersebut dengan

konstruk lainnya. Berdasarkan tabel 4.22, dapat disimpulkan bahwa semua variabel lebih besar daripada korelasi yang diperoleh dan berarti bahwa konstruk memiliki nilai *discriminant validity* yang baik.

Tabel 4.17

Average Variance Extracted (AVE) Persamaan 2

	Average Variance Extracted (AVE)	Akar AVE
KSDM	0,447	0,669
PTI	0,453	0,673
PKD	0,498	0,706
KT	0,658	0,811

Sumber : data primer yang diolah, 2011

Model memiliki *discriminant validity* yang baik, jika akar AVE untuk setiap konstruk dalam model lebih tinggi dari korelasi antara konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Diketahui dari perhitungan akar AVE untuk semua variabel lebih besar daripada korelasi yang diperoleh.

4.1.4 Uji Composite Reliability

Pengujian *Composite reliability* dilakukan dengan melihat nilai reliabilitas antara blok indikator dari konstruk yang membentuknya. Berikut adalah tabel hasil *output composite reliability* dari PLS.

Tabel 4.18

Composite Reliability Persamaan 1

Konstruk	Composite Reliability
KSDM	0,826
PTI	0,853
SPI	0,879
PKD	0,873
KA	0,917

Composite reliability adalah baik jika memiliki nilai di atas 0,70. Berdasarkan tabel di atas, nilai *composite reliability* untuk masing-masing variabel sudah memiliki nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,70. Dengan demikian model dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria *composite reliability*.

Tabel 4.19

Composite Reliability Persamaan 2

Konstruk	Composite Reliability
KSDM	0,836
PTI	0,851
PKD	0,873
KT	0,852

Sumber : data primer yang diolah

Composite reliability adalah baik jika nilainya diatas 0,70. Berdasarkan tabel di atas tampak terlihat nilai *composite reliability* untuk masing-masing variabel sudah memiliki nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,70. Dengan demikian model dalam penelitian ini telah memenuhi *composite reliability*.

4.2 Pengujian *Inner Model* atau Model Struktural

Berdasarkan pengolahan data dengan PLS, dihasilkan nilai koefisien determinasi (R-square) sebagai berikut.

Tabel 4.20

Nilai R-square Persamaan 1

Konstruk	R-Square
KA	0,821

Sumber : data primer yang diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai R-square untuk variabel keandalan adalah sebesar 0,821, yang berarti bahwa variabilitas konstruk keandalan dijelaskan oleh konstruk kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah sebesar 82,1%, sedangkan sisanya sebesar 17,9% dijelas oleh konstruk-kontruk yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 4.21

Nilai R-square Model Persamaan 2

Konstruk	R-Square
KT	0,682

Sumber : data primer yang diolah, 2011

Berdasarkan tabel diketahui bahwa R-square untuk variabel ketepatwaktuan adalah sebesar 0,682, yang berarti bahwa variabilitas konstruk ketepatwaktuan dijelaskan oleh konstruk kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah sebesar 68,2%, sedangkan sisanya sebesar 31,8% dijelas oleh konstruk-kontruk yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dan hubungan antar variabel dapat dilihat dari hasil *Inner Weight* berikut.

Tabel 4.22

Hasil *Inner Weight*

	Original sample estimate	mean of sub samples	Standard deviation	T-Statistic	Keterangan
KSDM → KA	0,213	0,181	0,142	1,503	Tidak Signifikan
PTI → KA	0,153	0,103	0,173	0,883	Tidak Signifikan
SPI → KA	0,441	0,458	0,175	2,520	Signifikan
PKD → KA	0,191	0,258	0,115	1,657	Tidak Signifikan
KSDM → KT	0,417	0,402	0,169	2,463	Signifikan
PTI → KT	0,316	0,315	0,149	2,125	Signifikan
PKD → KT	0,169	0,203	0,136	1,246	Tidak Signifikan

Sumber : data primer yang diolah, 2011

4.2 Interpretasi Hasil

Hasil analisis pada tabel 4.22 di atas menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikasn. Selanjutnya hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel pengawasan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

4.2.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian hipotesis H_1 menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada besarnya t statistic 1,503 < t tabel 1,984, yang berarti bahwa hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008). Ketidaksignifikanan ini mungkin disebabkan kondisi sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan yang belum mendukung. Sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang belum mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, satuan kerja yang ada hanya memiliki sedikit pegawai akuntansi. Sedangkan dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan tidak memiliki latar pendidikan akuntansi, hal ini terlihat dari data demografi responden. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Padahal fungsi dan proses akuntansi hanya dapat dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang ilmu akuntansi. Namun secara praktik kondisinya berbeda. Karena masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berlatar pendidikan akuntansi, sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka pegawai yang ada yang diberdayakan. Kelemahan yang ada diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

4.2.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian hipotesis H_2 menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan

pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada besarnya t statistic 2,463 > t tabel 1,984, yang berarti bahwa hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008). Sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik dan dapat menyelesaikannya dengan cepat. Sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat dibuat dengan tepat waktu.

4.2.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian hipotesis H_3 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada besarnya t statistic 0,833 < t tabel 1,984, yang berarti bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) dan Winidyaningrum (2010). Ketidaksignifikanan ini mungkin disebabkan teknologi informasi yang tidak atau belum dimanfaatkan secara optimal, dan pengimplementasian teknologi informasi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga implementasi teknologi informasi menjadi sia-sia dan semakin mahal dan tidak dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang handal.

4.2.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian hipotesis H_4 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada besarnya t statistic 2,125 > t tabel 1,984, yang berarti bahwa hipotesis keempat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) dan Winidyaningrum (2010), serta mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi

komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah, dapat mempercepat proses pengolahan data transaksi, keakurasian dalam perhitungan, serta menghasilkan *output* lainnya lebih tepat waktu.

4.2.5 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian hipotesis H_5 menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada besarnya t statistic 2,520 > t tabel 1,984, yang berarti bahwa hipotesis kelima diterima. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara optimal dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

4.2.6 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian hipotesis H_6 menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada besarnya t statistic 1,657 < t tabel 1,984, yang berarti bahwa hipotesis keenam ditolak. Pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi, akan menghasilkan kegiatan yang sesuai dengan tolok ukur/standar yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan juga sebagai tindakan korektif, apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diatasi, namun hal ini tidak memiliki pengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemeritah daerah.

4.2.7 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian hipotesis H_7 menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada besarnya t statistic 1,246 < t tabel 1,984, yang berarti bahwa hipotesis ketujuh ditolak. Di dalam prosedur pengawasan, mencakup mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Meskipun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dinyatakan bahwa Kabupaten Batang merupakan Kabupaten pertama se-Indonesia yang telah menyelesaikan laporan keuangan pada tahun 2010, namun ketepatwaktuan ini bukan disebabkan adanya faktor pengawasan keuangan daerah, atau dengan kata lain, pengawasan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5 PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
6. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
7. Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu :

1. Instrumen dan daftar pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar dikembangkan sendiri oleh peneliti, selebihnya mengadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Desi Indriasari (2008) dan Peraturan Pemerintah. Peneliti berusaha menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan telah melakukan beberapa kali perbaikan namun tetap memiliki kelemahan-kelemahan.
2. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.

5.3 Saran

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern. Sedangkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar atau bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, dan adanya sistem pengendalian intern yang memadai, diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan menjadi andal dan tepat waktu. Kontribusi lainnya adalah bahwa temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, misalnya dua nilai informasi lain yang belum diteliti, yaitu dapat dibandingkan dan dapat dipahami atau dengan menambah variabel independen yang lain.

Adapun beberapa saran untuk peneliti selanjutnya adalah :

1. Memperbesar jumlah sampel dan melengkapi metoda survei, misalnya dengan wawancara agar informasi yang didapat dari responden lebih lengkap.
2. Memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini atau menggunakan kuesioner yang tingkat validitas dan reliabilitasnya lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar. 2007. **"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No. 13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh"**. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Ghozali, Imam. 2008. **Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)**. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indriasari, Desi. 2008. **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**. *SNA XI. Pontianak.*

Insani, Istyadi. 2010. *Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. www.docstoc.com.

Mardiasmo. 2006. **Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance***. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, *Vol. 2 No. 1, Hal. 1-17.*

Rasul, Sjahruddin, Dr, S.H. 2003. **Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara**. Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia.

Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan. 2009. *BPK Serahkan 11 Kasus Dugaan Korupsi ke KPK*. www.bpk.go.id.

----------, Badan Pemeriksa Keuangan. 2010. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2010*. www.bpk.go.id.

----------, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

----------, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

----------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perencanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

----------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011.

----------, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

----------, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Safitri, Ratna Amalia. 2009**. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Semarang)"**. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.

Tuasikal, A. 2007. **Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah**. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, *Vol.08, No.01*.

Wahana Komputer. 2003. **Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer**. Yogyakarta : ANDI.

Waraswati, Dwi Ayu. 2010. **"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Auditor terhadap Creative Accounting"**. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.

Warisno. 2009. **"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi"**. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Wikipedia. 2010. *Pengendalian Intern*. id.wikipedia.org.

Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.

Winidyaningrum, Celviana. 2010. **"Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN)"**. *SNA XIII. Purwokerto.*

Yosa. 2010. *Pengertian Pengawasan*. www.itjenkemdagri.go.id